



ANALISIS SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN DI DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA (DPMPTSPTK) KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN 2021

MEGI APRILIASARI

Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi
Jl. Gatot Subroto KM. 7 Kebun Nenas, Desa Jake, Kab. Kuantan Singingi
Email : @gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini dilaksanakan pada Kecamatan Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singingi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Surat Izin Usaha Perdagangan di Dinas Penanaman Modal Layanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (DPMPTSPTK) Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2021. Teknik penarikan sampel menggunakan metode *Purposive Sampling*. *Purposive Sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan perumhangan tertentu yang jumlah informan yang peneliti tentukan yakni 25 orang dengan metode penarikan sampel jenuh yaitu keseluruhan populasi dijadikan sampel. Adapun dalam penelitian ini memerlukan data primer dan data sekunder. Analisis data yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif, yaitu menganalisa data yang diperoleh dari hasil dokumentasi, kemudian dilakukan wawancara dan observasi.

Hasil yang didapat dari penelitian ini adalah Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja (DPMPTSPTK) Kabupaten Kuantan Singingi belum sepenuhnya menjalankan fungsinya sebagai Badan Penyelenggara Perizinan. Mereka belum melaksanakan tugas mereka dalam bentuk pelayanan. Masih banyak masyarakat yang kurang puas dan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja belum ada tinjauan atau sosialisasi tentang tugas mereka sebagai Penyelenggara Perizinan kepada masyarakat di daerah-daerah Kuantan Singingi.

Kata Kunci : Evaluasi Izin Usaha

ABSTRACT

This research was conducted in Gunung Toar District, Kuantan Singingi Regency. The purpose of this study was to find out how the implementation of the Trading Business License at the One Stop Integrated Service and Manpower Investment Service (DPMPTSPTK) of Kuantan Singingi Regency in 2021. The sampling technique used the Purposive Sampling method. Purposive Sampling is a sampling technique with a certain housing in which the number of informants that the researcher determines is 25 people with the saturated sampling method, where the entire population is sampled. As for this research requires primary data and secondary data. Analysis of the data used is descriptive quantitative, namely analyzing the data obtained from the documentation, then conducted interviews and observations.

The results obtained from this study are the One Stop Integrated Service and Manpower Investment Service (DPMPTSPTK) Kabupaten Kuantan Singingi has not fully carried out its function as a Licensing Organizing Agency. They have not carried out their duties in the form of service. There are still many people who are dissatisfied and the One-Stop Integrated Service and Manpower Investment Office has not had a review or socialization about their duties as Licensing Operators to the community in the Kuantan Singingi areas.



Keywords: Evaluation of Business License

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Pelayanan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari eksistensi aparatur pemerintah dan masyarakat. Peran aktif masyarakat dalam bidang pelayanan tidak akan berjalan tanpa adanya dukungan dan peran aktif pemerintah, karena pada hakekatnya pemerintah sebagai pelayanan masyarakat (abdi masyarakat) dimana pemerintah tidak melayani dirinya sendiri, tetapi melayani masyarakat serta menciptakan masyarakat hidup sejahtera. Di bidang pemerintahan masalah pelayanan sangat penting, perannya lebih besar karena menyangkut kepentingan umum, bahkan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Kerena peranan pelayanan yang diselenggarakan oleh pemerintah melibatkan seluruh aparat Pegawai Negeri makin terasa dengan adanya peningkatan kesadaran bernegara dan bermasyarakat, maka pelayanan telah meningkat kedudukannya dimasyarakat menjadi suatu hak, yaitu hak atas pelayanan. Namun ternyata hak masyarakat atau perorangan untuk memperoleh pelayanan dari aparat pemerintah terasa belum dapat memenuhi harapan semua pihak. Pelayanan publik yang diberikan pemerintah kepada masyarakat dalam segala bidang unit pelayanan di Indonesia sangat buruk, disana sini masih ditemui kelemahan-kelemahan yang dampaknya sering merugikan masyarakat yang menerima layanan, masalah yang kerap terjadi dalam kegiatan pelayanan publik yang dilakukan oleh masyarakat diantaranya birokrasi yang berbelit-belit pungutan liar yang dilakukan oleh para birokrat, waktu yang terlalu lama untuk mengurus sebuah pelayanan. Banyaknya jenis pelayanan publik menyebabkan perlu dilakukan batasan kajian pada jenis pelayanan tertentu.

Salah satu jenis pelayanan publik yang mendasar adalah pelayanan di sektor administrasi perizinan. Pelayanan dalam sektor administrasi perizinan merupakan jenis pelayanan yang cukup banyak permintaannya seperti Izin Mendirikan Bangunan, Izin Usaha Angkutan, Izin Usaha Perikanan, Izin Usaha Perkebunan, Izin Usaha Perindustrian, lebih dikhususkan lagi tentang Izin Usaha Perdagangan. Dalam mendirikan sebuah usaha, hal yang tidak boleh dilewatkan adalah melengkapi perizinan usaha, salah satu diantaranya adalah Surat izin Usaha Perdagangan (SIUP).

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang uraian dan penjelasan yang telah penulis kemukakan dalam latar belakang diatas, maka yang menjadi rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah :“Bagaimana Pengurusan Surat Izin Usaha Perdagangan Di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2021”.

Tujuan Penelitian

Untuk Mengetahui Bagaimana Pengurusan Surat Izin Usaha Perdagangan Di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2021.

Manfaat Penelitian

1 Manfaat Teoritis

Manfaat secara Teoritis dapat memberikan pengetahuan dan wawasan kepada peneliti tentang Pengurusan Surat Izin Perdagangan di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi.



2 Manfaat Praktis

Manfaat bagi penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam pengurusan Surat Izin Usaha Perdagangan kepada pemimpin lembaga teknis pemerintahan dan informasi bagi instansi terkait di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi. Dan secara akademis untuk memperoleh gelar sarjana pada prodi Ilmu Administrasi Negara Di Fakultas Ilmu Sosial.

METODE PENELITIAN

1 Jenis Penelitian

Sesuai dengan judul penelitian ini, maka penulis menggunakan Metode Penelitian Kuantitatif. Data Kuantitatif adalah data yang berbentuk angka atau data kualitatif yang diangkakan/scoring(dalam Sugiyono, 2019 : 9).

Metode Kuantitatif dinamakan metode tradisional, karena metode ini sudah cukup lama digunakan sehingga sudah mentradisi sebagai metode untuk penelitian. Metode ini disebut sebagai metode positivisik karena berlandaskan pada filsafat positivism. Metode ini sebagai metode ilmiah yaitu konkrit/empiris, objektif, terukur, rasional, dan sistematis. Metode ini juga disebut metode discovery, karena dengan metode ini dapat ditemukan dan dikembangkan berbagai iptek baru. Metode ini disebut metode kuantitatif karena data penelitian berupa angka-angka dan analisis menggunakan statistic. Metode penelitian kuantitatif ini dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivism, digunakan instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistic, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan (dalam Sugiyono, 2019 :16).

Metode penelitian Survei adalah metode penelitian kuantitatif yang digunakan untuk mendapatkan data yang terjadi pada masa lampau atau saat ini, tentang keyakinan, pendapat, karakteristik, perilaku, hubungan variable dan untuk menguji beberapa hipotesis tentang variable sosiologis dan psikologi dari sampel.

2. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas : obyek/subyek yang mempunyai kuantitas karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipeljadi dan kemudian ditarik kesimpulannya (dalam Sugiyono, 2019 : 126).

3. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (dalam Sugiyono, 2019 : 127).

Teknik penarikan sampel untuk unsur Staff maka penentuan sampel menggunakan metode *Purposive Sampling*. Teknik sampling yang digunakan peneliti ini adalah teknik digunakan ketika peneliti mempunyai pertimbangan-pertimbangan tertentu dalam pengambilan sampelnya (Arikunto, 2009 : 128). Sedangkan unsur masyarakat yang mengurus surat izin usaha perdagangan menggunakan teknik penarikan *Random Sampling* (Sampel acak) adalah pengambilan anggota sampel unsur masyarakat yang Mengurus surat izin usaha perdagangan.

Untuk lebih lanjut informasi pada penelitian dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel III.1 : Informan Peneliti Tentang evaluasi surat izin usaha perdagangan di dinas penanaman modal pelayanan terpadu satu pintu dan tenaga kerja kabupaten kuantan singingi (studi kasus di Kecamatan Gunung Toar).

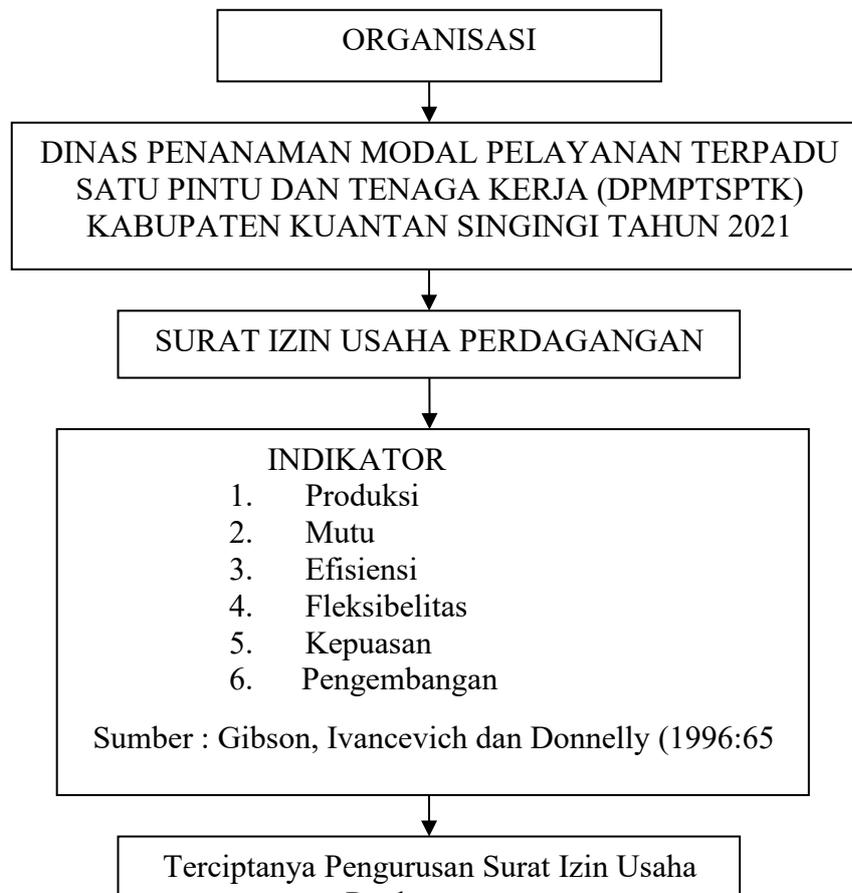
No	Unsur Respond	Jumlah		Persentase
		Polu	Samp	



	en	lasi	el	
1	Kepala Dinas		1	100%
2	Kepala Bidang		1	100%
3	Kepala Seksi	5		100%
4	Pedagan g atau Masyara kat	45		100%
Jumlah		50	2	100%

Sumber : Modifikasi Penulis 2021

Kerangka Pemikiran



LANDASAN TEORI

1. Teori/Konsep Administrasi Negara



Menurut Herbert A. Simon (dalam Syafie, 2010 : 13), *administration can be defined as the activtas of groups cooperating to accomplish commom goals*. Jadi baginya administrasi dapat dirumuskan sebagai kegiatan-kegiatan kelompok kerja sama untuk mencapai tujuan-tujuan bersama.

Menurut Leonard D. White (dalam Syafie, 2010 : 13), ia menjelaskan administrasi sebagai suatu proses yang umum pada setiap usaha kelompok-kelompok, baik pemerintah maupun swasta, baik sipil maupun militer, baik dalam ukuran besar maupun kecil.

Administrasi negara atau administrasi publik adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh aparatur negara atau pemerintah untuk mencapai tujuan negara secara efisien.

- 1) Administrasi negara meliputi implementasi kebijaksanaan pemerintah yang telah ditetapkan oleh badan-badan perwakilan politik.
- 2) Administrasi negara dapat didefinisikan sebagai koornisasi usaha-usaha perorangan dan kelompok untuk melaksanakan kebijaksanaan pemerintah. Hal ini terutama meliputi pekerjaan sehari-hari pemerintah.
- 3) Administrasi negara adalah suatu proses yang bersangkutan dengan pelaksanaan kebijakan-kebjikan pemerintah, pengarahan kecakapan dan teknik-teknik yang tidak terhingga jumlahnya, membrikan arah dan maksud terhadap usaha sejumlah oran

2. Teori/Konsep Organisasi

Pengertian Organisasi dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu organisasi dalam arti statis dan organisasi dalam arti dinamis. Organisasi dalam arti statis berarti melihat organisasi sebagai suatu yang tidak bergerak/diam Secara singkat dapat dikatakan bahwa organisasi dalam arti statis merupakan wadah atau tempat kegiatan administrasi dan manajemen berlangsung dengan gambaran yang jelas tentang saluran hirarki daripada kedudukan, jabatan wewenang, garis komando dan tanggung jawab. Sedangkan organisasi dalam arti dinamis berarti memandang organisasi sebagai suatu organ hidup, suatu organisasi yang dinamis (dalam Wursanto, 2003 : 41).

Organisasi dapat dikatakan sebagai alat untuk mencapai tujuan, oleh karna itu organisasi dapat dikatakan wadah kegiatan dari pada orang-orang yang bekerjasama dalam usahanya untuk mencapai tujuan. Di kegiatan itu orang-orang harus jelas tugas, wewenang dan tanggung jawabnya, hubungan dan tata kerjanya.

Pengertian yang demikian disebut organisasi yang “statis”, karena sekedar hanya melihat dari strukturnya. Di samping itu terdapat pengertian organisasi yang bersifat “Dinamis”. Pengertian ini organisasi dilihat dari pada sudut dinamikanya, aktivitas atau tindakan daripada tatahubungan yang terjadi di dalam organisasi itu, baik yang bersifat formal maupun informal.

3. Teori/Konsep Pelayanan

Secara etomologis, Pelayanan berasal dari kata Layan yang berarti Membantu Menyiapkan atau Mengurus apa-apa yang diperlukan seseorang, kemudian pelaynan dapat diartikan sebagai Perihal atau melayani, servis atau jasa, sehubungan dengan jual beli barang atau jasa (Poerwadarminta, 1995 : 571).

Pengertian Pelayanan (*service*) *American Marketing Association* oleh Donald (1984 : 22) bahwa pelayanan adalah merupakan kegiatan atau manfaat yang ditawarkan oleh semua pihak lain dan pada hakekatnya tidak berwujud serta tidak menghasilkan kepemilikan sesuatu, proses produksinya mungkin juga tidak dikaitkan dengan suatu produk fisik.

Kesimpulannya pelayanan pada intinya adalah salah satu bagian yang tidak dapat dipisahkan dari penyelenggaraannya pemerintah. Pelayanan merupakan bentuk kongkret pemerintah bersifat administrative maupun pemenuhan terhadap barang dan jasa. Pemerintah sebagai



penyedia pelayanan tertentu harus melakukan pelayanan publik secara optimal untuk menghasilkan pelayanan publik yang dibutuhkan oleh masyarakat tertentu.

4. Teori/Konsep Surat Izin Usaha

Pengertian Surat Izin Usaha Perdagangan Menurut Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 Tentang Penerbitan Surat Izin Perdagangan (permendag 2007 : 36), surat Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disebut SIUP adalah surat Izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha yang sedang dijalankan adalah sah dan legal serta sudah diakui pemerintah.

Menurut Sjahran Basah, Izin adalah suatu perbuatan hukum administrasi Negara sebagai suatu yang menerapkan peraturan dalam hal yang konkrit yang bersumber pada persyaratan dan prosedur sebagaimana hal yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan (dalam Ridwan HR, 2003 : 158).

Selain pengertian izin yang diberikan oleh beberapa ahli tersebut di atas, ada pengertian izin yang dimuat dalam peraturan yang berlaku, misalnya dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah. Dalam ketentuan tersebut izin diberikan pengertian sebagai dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lain yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan hukum untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu. Pemberian pengertian izin tersebut menunjukkan adanya penekanan pada izin yang tertulis, yakni berbentuk dokumen, sehingga yang disebut sebagai izin tidak termasuk yang diberikan secara lisan.

5. Teori Manajemen Sumber Daya Manusia

Menurut Gibson, Ivancevich, dan Donnely Manajemen adalah Proses individual maupun kelompok untuk mengkoordinasikan berbagai kegiatan yang dilakukan oleh orang lain agar memperoleh hasil yang tidak dapat diraih oleh seorang individu saja (dalam Rusyan, 2018 : 15).

Manajemen Sumber Daya Manusia adalah ilmu dan seni mengatur hubungan dan peranan kerja agar efektif dan efisien membantu terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan dan masyarakat. Menurut Edwin B. Flippo Manajemen personalia adalah perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengendalian dari pengadaan, pengembangan, kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan, dan pemberhentian karyawan, dengan maksud terwujudnya tujuan perusahaan, individu, karyawan dan masyarakat. Menurut Dare Yoder Manajemen personalia adalah penyedia kepemimpinan dan pengarahan para karyawan dalam pekerjaan atau hubungan kerja mereka (dalam Hasibuan, 2016 : 10).

Maka dari itu Manajemen Sumber Daya Manusia ialah komponen penting dalam kehidupan yang akan menunjang kebutuhan manusia baik dalam organisasi maupun individual. Kemudian dari sejumlah definisi dari MSDM di atas, dapat menjadi pendayagunaan sumber daya manusia yang diterapkan dalam fungsi-fungsi dari MSDM yang berupa perencanaan, rekrutmen dan seleksi, pengembangan sumber daya manusia, pengembangan karir, dan hubungan industrial lainnya.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Setelah diadakan penelitian dan pengumpulan data dilapangan melalui penyebaran kuesioner kepada responden yang berjumlah 25 orang. dan didapat gambaran mengenai responden, berikut dideskripsikan identitas responden berdasarkan jenis kelamin, tingkat usia, pekerjaan dan pendidikan.



1. Indikator Produksi

Dalam pengurusan surat izin usaha perdagangan (SIUP) adalah bagaimana Prosedur atau cara pembuatan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP). Instrumen pertanyaan untuk indikator Produksi adalah :

1.1. Kemudahan Prosedur Pengurusan Pembuatan SIUP di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja

Kemudahan prosedur Pengurusan pembuatan SIUP di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja

2. Indikator Mutu

Mutu adalah suatu kemampuan organisasi untuk memenuhi kualitas atau harapan dalam pembuatan Surat Izin Usaha Perdagangan.

2.1. Mutu atau Kualitas SIUP

Mutu atau kualitas SIUP , dengan pertanyaan Bagaimana Mutu Pelayanan dalam memenuhi kualitas pembuatan SIUP.

3. Indikator Efisiensi

Efisiensi adalah sejumlah konsep yang terkait pada kegunaan pemaksimalan serta pemanfaatan seluruh sumber daya dalam proses produksi.

3.1 Kondisi Pelayanan di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja

Kondisi pelayanan di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja, dengan pertanyaan Bagaimana Kondisi Pelayanan dalam memperhatikan keterpaduan antara persyaratan dengan produk pelayanan yang diberikan.

4. Indikator Fleksibilitas

Fleksibilitas adalah urusan yang menunjukkan daya tanggungjawab organisasi terhadap tuntutan perubahan internal dan eksternal atau penyesuaian diri secara mudah dan cepat dalam pelayanan pembuatan SIUP.

4.1 Menanggapi keluwesan dalam pelayanan pembuatan SIUP

Menanggapi Keluwesan dalam Pembuatan SIUP, dengan pertanyaan Bagaimana kemampuan pegawai dan tenaga kerja di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam memberikan Pelayanan akurat, tepat, cepat kepada masyarakat.

5. Indikator Kepuasan

Kepuasan adalah menunjukan pada perasaan tenaga kerja atau karyawan terhadap pekerjaan dan peran mereka didalam organisasi.

5.1 Kepuasan Fasilitas atau peralatan pembuatan SIUP yang menunjang tugas, kinerja dan kualitas pelayanan.

Kepuasan Fasilitas atau peralatan pembuatan SIUP yang menunjang tugas, kinerja dan kualitas pelayanan di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Dengan pertanyaan Bagaimana Kondisi peralatan atau fasilitas pembuatan SIUP yang menunjang tugas, kinerja dan kualitas pelayanan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

6. Indikator Pengembangan

Pengembangan adalah ukuran mencerminkan kemampuan dan tanggungjawab organisasi dalam memperbesar kapasitas dan potensinya untuk berkembang melalui investasi sumber daya.

6.1 Keadaan dan Kenyamanan Gedung dan Ruang di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu.



Pengembangan Gedung dan Ruang di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Dengan pertanyaan Bagaimana Keadaan dan Kenyamanan Gedung dan Ruang di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Indikator Produksi, karyawan di Dinas Penanaman Modal telah menunjukkan kemampuannya terhadap pengurusan SIUP adalah Sangat Baik dimana karyawan di Dinas Penanaman Modal telah berupaya memberikan pelayanan yang baik dari segi informasi yang dibutuhkan masyarakat untuk membuat SIUP tersebut.

Indikator Mutu, dalam kemampuan karyawan untuk memenuhi kualitas atau harapan dalam pembuatan Surat Izin Usaha Perdagangan di Dinas Penanaman Modal telah berupaya semaksimal mungkin untuk bisa memberikan pelayanan yang baik terhadap masyarakat sesuai dengan bidang keahliannya masing-masing sesuai dengan aturan dan ketentuan yang ada di Dinas Penanaman Modal tersebut.

Indikator Efisiensi, yaitu karyawan telah se efisien mungkin dalam melakukan pembuatan SIUP dan memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat dalam pembuatan SIUP tersebut. Dan sebisa mungkin karyawan bisa memenuhi kebutuhan masyarakat dalam pembuatan SIUP dan dapat mempermudah dalam pembuatan SIUP tersebut.

Indikator Fleksibilitas, yaitu segala urusan yang menunjukkan daya tanggungjawab organisasi terhadap tuntutan perubahan internal dan eksternal atau penyesuaian diri karyawan secara mudah dan cepat dalam pelayanan pembuatan SIUP, dan karyawan telah fleksibel dalam membuat dan mengurus Surat Izin Usaha Perdagangan di Dinas Penanaman Modal tersebut.

Indikator Kepuasan, yaitu menunjukan pada perasaan tenaga kerja atau karyawan terhadap pekerjaan dan peran mereka didalam organisasi. Disini pegawai atau karyawan di Dinas Penanaman Modal sudah melakukan yang terbaik dalam pengurusan Surat Izin Usaha Perdagangan di Dinas Penanaman Modal sehingga masyarakat merasa puas dengan hal ini.

Indikator Pengembangan, yaitu ukuran mencerminkan kemampuan dan tanggungjawab organisasi dalam memperbesar kapasitas dan potensinya untuk berkembang melalui investasi sumber daya sehingga masyarakat yang pergi ke Dinas Penanaman Modal tersebut merasa puas dengan fasilitas dan ruang tunggu yang ada di Dinas Penanaman Modal tersebut. Sehingga Dinas Penanaman Modal berkembang hingga saat ini.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil sebaran kuesioner yang telah dilakukan mengenai Analisis Surat Izin Usaha Perdagangan di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi yang menghasilkan nilai rata-rata 5,00. Berarti pada interval Sangat Baik. Berarti Pengurusan Surat Izin Usaha Perdagangan yang artinya Pengurusan Surat Izin Usaha Perdagangan Sangat Baik di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi. Hal ini dikarenakan seluruh indikator yang digunakan yaitu : Indikator Produksi, Indikator Mutu, Indikator Efisiensi, Indikator Fleksibilitas, Indikator Kepuasan, Indikator Pengembangan.

Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas diajukan saran sebagai berikut :

1. Diharapkan kepada karyawan selalu memberikan dan mempertahankan pelayanan dengan baik dan semaksimal mungkin melayani masyarakat dalam pembuatan SIUP dan memberikan informasi yang benar-benar dibutuhkan masyarakat dalam pembuatan Surat Izin Usaha Perdagangan tersebut sesuai dengan aturan dan ketentuan yang ada di Dinas



- Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi.
2. Kepada peneliti selanjutnya disarankan agar lebih memperdalam mengenai penelitian tentang Analisis Surat Izin Usaha Perdagangan di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ahadi, 2004. *Pengantar Manajemen*. Pekanbaru UIR Press.
- Amin Ibrahim, 2009 *Pokok-Pokok Administrasi Publik dan Implementasinya* Penerbit Refika Aditama.
- Amla Widodo, 2020 *Analisis Standar Operasional Presedur Pelayanan Publik “Skripsi”* Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi.
- Harbani Pasoloq, 2017 *Teori Administrasi Publik* Penerbit Alfabeta Bandung.
- Nasrudin, 2018. *Manajemen Pelayanan Publik*. CV. Pustaka Setia.
- Nur Aminah, 2020 *Analisis Pengurusan Surat Rujukan BPJS Kesehatan Di 8Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Teluk Kuantan “Skripsi”* Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi.
- Sugiyono, 2006. *Metode Penelitian Administrasi*. Alfabeta, Bandung.
- Sugiyono, 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Penerbit Alfabeta Bandung.
- Suryabrata, Drs. Sumadi, 2011. *Metodologi Penelitian*. Raja Grafindo Prasada. Jakarta.
- Sutarto, 1998. *Dasar-Dasar Organisasi*. Gadjah Mada. University Press.

Peraturan Perundang-Undangan

- Keputusan Menpan Nomor 63 Tahun 2003 Tentang Asas-Asas Pelayanan Publik.
- Keputusan Menpan Nomor 81 Tahun 1993 Tentang Penyelenggaraan Layanan Publik.
- Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2007 Tentang Penerbitan Surat Izin Perdagangan.

Dokumentasi

- Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2007 Tentang Penerbitan Surat Izin Perdagangan.